

BAB VI

**TANTANGAN DAN KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN TAN MALAKA
TERHADAP PENDIDIKAN KONTEMPORER DI INDONESIA**

6.1. Pengantar

Produk pendidikan adalah bangsa dan peradaban. Selama bangsa dan peradaban manusia masih ada, maka proses pendidikan pun akan terus berjalan. Untuk itu, pendidikan merupakan proses panjang dalam mentransformasikan manusia menuju kehidupan yang beradab, empatif dan humanis. Pendidikan laksana “mata air zamzam” yang tidak henti mengeluarkan air walaupun setiap hari ribuan manusia mengambil airnya, begitu juga pendidikan.

Namun seiring perkembangan peradaban manusia di abad 21, lembaga pendidikan turut mengalami tantangan yang berat. Perubahan sistem politik autoritatif di masa orde baru menjadi sistem demokrasi di masa reformasi turut menyumbangkan tantangan tersebut. Bagaimana masyarakat Indonesia dituntut untuk lebih memiliki sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 amandemen ke empat.

Selain itu, Indonesia yang kini memasuki era globalisasi pun dituntut setiap sumber daya manusianya untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan

yang berkualitas dan kompetitif. Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan ekspansi dunia ekonomi semata, tetapi juga segala aspek kehidupan manusia. Secara sosiologis, Anthony Giddens memaparkan bahwa “globalisasi tidak hanya berkaitan dengan dunia ekonomi global, tetapi juga transformasi konteks pengalaman sosial baik yang bersifat lokal maupun personal”.¹ Lebih lanjut Anthony Giddens menambahkan, “globalisasi tidak hanya menarik ke atas, melainkan juga mendorong ke bawah, menciptakan tekanan-tekanan baru bagi otonomi local”.² Maksudnya, globalisasi tidak hanya membawa kebaikan atau kemajuan pada suatu negara yang mampu bersaing, tetapi juga dapat membawa keterbelakangan atau kemunduran bagi suatu negara yang tidak mampu bersaing.

Dampak perubahan sistem politik dan globalisasi ini pun secara langsung turut mempengaruhi dinamika *input* dan *output* pendidikan Indonesia. Segala bentuk desain kurikulum dan model pembelajaran yang *update* pun dirancang guna beradaptasi atas tantangan zaman tersebut. Ada yang berhasil, namun ada juga yang justru jauh dari nilai-nilai filosofis pendidikan itu sendiri. Adapun permasalahan pendidikan meliputi, kegagalan dalam membangun dan menciptakan kesadaran kritis, sikap egoisme, dominannya budaya “membeo” daripada “menggonggong”, dominannya

¹ Anthony Giddens, *Beyond Left and Right: Tarian “Ideologi Alternatif” di Atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*, penerjemah Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCISOD, 2003), hal. 18.

² Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 8.

individuasi, *westernisasi* yang tidak terkontrol, diskriminasi dan kapitalistik pendidikan. Hulu dari kegagalan ini akhirnya memperpanjang nilai “merah” dari perjalanan pendidikan Indonesia yang tidak kritis, radikal dan revolusioner terhadap berbagai ekspansi sistem kehidupan masyarakat, baik dalam level dunia, nasional, maupun lokal. Tantangan berat bagi dunia pendidikan Indonesia di abad 21.

Namun tidak lantas kita fatalis atas masalah tersebut. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu berjuang demi harkat dan martabat bangsa serta negaranya. Oleh karena itu, karena pendidikan melahirkan bangsa dan peradaban. Maka kiranya kita mesti berbenah dan mengevaluasi jalannya praktik pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1945 dua wilayah Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika Serikat. Dampak pemboman ini membuat hampir lebih dari 200 ribu jiwa penduduk Jepang tewas dan hancurnya segala sarana dan prasarana Jepang saat itu. Akan tetapi, peristiwa ini tidak lantas membuat negara Jepang tidak berdaya dan bahkan menjadi negara terjajah. Berkat keinginan keras, perlahan Jepang menata kembali sendi-sendi kehidupannya.

Sampai akhirnya kini, Jepang yang pada tahun 1945 diramalkan akan menjadi negara terbelakang pasca pemboman, berkembang menjadi negara maju dan mengalahkan negara-negara di Asia lainnya, khususnya dalam bidang teknologi. Bahkan ekspansi *fashion* dan animasi Jepang sudah

merambah dunia, termasuk Indonesia. Apa yang membuat Jepang menjadi maju? Tidak lain keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memajukan sumber daya manusianya melalui model pendidikan yang terintegrasi spirit Samurai atau *bushido*. Yamago Soko (1622-1985) seorang filsuf Jepang dan juga penganut konfusianisme dalam buku panduan untuk para Samurai Jepang mengatakan, “jangan malu makan dan berpakaian sederhana, jangan pula memimpikan hidup yang nyaman, selalulah menyibukkan diri walau tidak mempunyai pekerjaan, dan jangan membelanjakan lebih dari pendapatan. Istirahat itu setelah mati”.³

Optimisme dan spirit pendidikan Jepang yang terintegrasi dengan nilai-nilai filosofi Samurai dan keberhasilannya, sepertinya patut menjadi refleksi atas orientasi dan implementasi pendidikan di Indonesia. Walaupun secara historis Jepang pernah menjajah Indonesia, namun ide dan spirit pendidikannya dapat menjadi contoh atas arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu negara. Perlu kita ingat kembali, Indonesia merdeka tidak lepas dari peran pendidikan sebagai alat perlawanan. Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa misalnya membuat salah satu rumusan pendidikan kebudayaan sebagai filter kebudayaan Barat dan media melestarikan khasanah kebudayaan Indonesia dikalangan generasi muda.

Sementara Tan Malaka dengan pendidikan progresifnya merumuskan pendidikan untuk membangun kesadaran kritis dan revolusioner bagi bangsa

³ Tim Kreatif LKM UNJ, *Restorasi Pendidikan Indonesia*, *Op.Cit.*, hal. 99.

yang terjajah. Masih banyak lagi para tokoh pendidikan Indonesia khususnya di masa pra kemerdekaan yang mendesain bentuk dan ide pendidikan secara sistematis, kultural, progresif, nasionalis, dan kerakyatan. Tinggal bagaimana kita memandang bentuk dan ide pendidikan tersebut sebagai sesuatu yang kadaluwarsa atau masih relevan untuk diterapkan. Untuk itu, bab ini membahas mengenai persoalan tantangan pendidikan kontemporer dengan latar belakang pemikiran pendidikan Tan Malaka serta kontekstualisasinya terhadap pendidikan kontemporer di Indonesia.

6.2. Kontekstualisasi Pemikiran Tan Malaka Terhadap Pendidikan

Kontemporer

6.2.1. Kapitalistis Pendidikan Versus Sosialistis

Pendidikan merupakan hak semua orang sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Secara metaforik, pendidikan adalah perhiasan di waktu senang dan tempat berlindung di waktu susah. Mungkin itulah yang mendorong manusia untuk mengeyam pendidikan. Tapi dalam sisi lain tak akan ada habisnya untuk membicarakan permasalahan pendidikan, khususnya di Indonesia yang begitu kompleks. Dari kualitas guru yang masih diragukan, sampai kurikulum yang selalu berubah-ubah sampai yang terakhir yaitu KTSP.

Hal ini terlihat jelas bahwa peserta didik layak nya obyek kelinci percobaan dari kebijakan yang *impolisi*.

Masalah lainnya yaitu mahal nya biaya pendidikan, sehingga membuat pola kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan semakin nyata. Gejala-gejala sosial dari dampak itu pun, kini menjadi sorotan yang faktual di beberapa media massa, dari seorang ibu yang melacurkan diri demi membayar biaya sekolah anaknya, sampai ada seorang anak yang bunuh diri karena malu sebab orang tuanya tidak sanggup membayar biaya sekolahnya. Ironis, seharusnya pendidikan menjadi hak setiap rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin. Tetapi kenyataannya tidak semua dari mereka dapat mengakses hak mereka. Ini tentu berkontradiktif dengan amanat yang tercantum di dalam UUD 1945 mengenai hak setiap rakyat dalam mendapatkan pendidikan. Perihal ketidakkonsistenan antara *das sollen* dan *das sein* pada implementasi pendidikan dewasa ini, Tan Malaka jauh sebelum Indonesia merdeka sudah mengingatkan bahwa salah satu program nasional Indonesia merdeka adalah merakyatkan pendidikan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (atau istilahnya pelaksanaan wajib belajar).⁴

⁴ Lihat uraian Tan Malaka tentang program nasional Indonesia poin pelajaran dan pendidikan dalam *Naar de Republiek Indonesia: Menuju Republik Indonesia, Op.Cit.*

Idealnya penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara berkeadilan. Pemanusiawian pendidikan nasional merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia pasca reformasi. Namun, apakah para pemimpin negeri ini memandang dunia pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan? Tak mudah dijawab, kecuali sibuk dengan safari dan anekdot politiknya.

Bukti ketidakseriusan pemerintah dapat kita lihat pada alokasi pendidikan yang “setengah hati”. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 amandemen ke empat disebutkan, negara wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan minimal 20 % dari anggaran APBN atau APBD. Namun pemerintah menganggarkannya secara bertahap dan tidak langsung 20 %. Misalnya pada tahun 2004 pemerintah hanya menganggarkan dana sebesar 6,6 %, disusul tahun 2005 sebesar 9,29 %, kemudian pada tahun 2006 sebesar 12,01 %. Selanjutnya 14,68 % pada tahun 2007, lalu tahun 2008 sebesar 17,40 %, dan 20,01 % pada tahun 2009. Akan tetapi kenyataannya, anggaran pendidikan yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan besaran alokasi yang sudah disebutkan di atas. Untuk tahun 2005 saja, anggaran pendidikan hanya sebesar 7 % atau Rp. 26,5 triliun dari APBN 2005. Pada tahun 2006, pendidikan hanya mendapatkan dana sebesar Rp.36,7 triliun atau 9,1 % dari APBN 2006,

yang seharusnya anggaran dana pendidikan pada tahun 2006 itu sebesar 12,01 %. Tahun 2007 pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar 11,8 % atau sekitar Rp. 45 triliun. Terakhir tahun 2008 pemerintah memang menepati janjinya untuk menganggarkan dana pendidikan 20%, tetapi 20% ternyata tidak murni untuk anggaran pendidikan. Sebab 20% yang dianggarkan sudah termasuk di dalamnya gaji guru dan dosen.

Itu baru segelintir dari pelanggaran konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia yaitu asimilasi pendidikan terhadap dunia kapitalisme. Apalagi asimilasi ini mendapat dukungan legalitas hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 77 tahun 2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan pesyaratan di bidang penanaman modal, yang disahkan pada 3 Juli 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Perpres tersebut antara lain disebutkan,

Tabel 6.2.1.1. Perpres RI nomor 77 tahun 2007

No.	Bidang Usaha	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) *	Batasan Kepemilikan Modal	Sektor
72	Pendidikan Dasar dan Menengah	80121, 80122, 80123, 80221, 80222	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional
73	Pendidikan Tinggi	80321, 80322	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional
74	Pendidikan nonformal	80921, 80922, 80923, 80929	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional

Sumber: Perpres RI nomor 77 tahun 2007

* *KBLI* merupakan klasifikasi baku mengenai usaha-usaha/kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Disusun dengan maksud untuk menyediakan satu set kelompok kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, dan penyajian

data masing-masing kegiatan ekonomi, serta untuk digunakan disaat mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatannya.

Perpres tersebut menyiratkan bahwa pendidikan merupakan barang komoditi yang dapat menjanjikan keuntungan kapital bagi para investor. Akhirnya pendidikan Indonesia turut terjerat dalam jaringan-jaringan kapitalisme. Sebab, pada dasarnya penanaman modal tidak lain untuk mendapat *feedback* keuntungan bagi investor tersebut. Mansour Fakhri secara teoritis mengungkapkan bahwa “tujuan kapitalisme adalah pemupukan modal melalui proses-proses penanaman modal”.⁵

Kapitalisme dalam pandangan Marx adalah sistem yang bersandarkan pada pencarian keuntungan yang lebih besar.⁶ Selain itu, dalam kapitalisme yang ingin dihasilkan adalah nilai tukar dan bukan nilai pakai.⁷ Maksudnya, investor membeli suatu produk atau barang atau jasa bukan untuk digunakan olehnya melainkan untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga investasi yang dikeluarkannya. Sementara Weber sebagaimana dikutip Giddens menambahkan, “kapitalisme modern bertujuan memperoleh uang sebanyak-banyaknya dengan strategi yang

⁵ Mansour Fakhri, dalam Ton Dietz, *Hak Atas Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press, dan REMDEC, 1999), hal. vi.

⁶ Lihat uraian Giddens tentang pandangan Marx terhadap kapitalisme dalam Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern ; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hal. 65.

⁷ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, *Op.Cit.*, hal. 163-164.

rasional dan sistematis”.⁸ Sementara secara sinis Tan Malaka menyatakan bahwa “kapitalisme adalah bentuk perampokan terhadap hak-hak kemanusiaan”.⁹ Inilah logika kapitalisme dengan muaranya yakni mencari keuntungan (sebesar-besarnya). Dengan demikian kapitalisme pendidikan bagi Tan Malaka tidak lain sebagai bentuk pengakumulasian materi (keuntungan) dan memarjinalkan prinsip kemanusiaan serta keadilan.

Dampak nyata kapitalisme pendidikan yaitu membuat biaya pendidikan semakin mahal. Pernyataan ini pun dibenarkan oleh *Indonesia Corruption Watch*, bahwa “setiap tahun biaya sekolah semakin mahal dan bahkan praktik korupsi berlangsung di dalamnya”.¹⁰ Mahalnya biaya pendidikan ini pun diikuti dengan tingkat putus sekolah dan bahkan tidak sama sekali bersekolah. Berdasarkan Sensus Ekonomi Nasional 2003, hampir 67% anak putus sekolah dikarenakan tidak mempunyai biaya. Masalah putus sekolah merupakan rentetan dari gagalnya sistem pendidikan yang salah satunya termanifestasikan dalam tingginya biaya pendidikan.¹¹

⁸ Lihat uraian Giddens tentang pandangan Weber terhadap kapitalisme dalam Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, Op.Cit.*, hal. 155-156.

⁹ Perihal mengenai kapitalisme merampok dapat dilihat dalam uraian Tan Malaka, *Merdeka 100%: Tiga Percakapan Ekonomi Politik, Op. Cit.* dan *Aksi Massa, Op. Cit.*

¹⁰ Uraian lengkap lihat Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2004), hal. 70 -109.

¹¹ Hidayat Saleh, dan Abdul Hakim (ed), *Pekerja Anak, Pendidikan Anaka Pekerja Buruh, Skema*

Lebih lanjut dalam penelitian KSBSI, KSPSI, dan KSPI pada tahun 2007 disebutkan, ketimpangan antara rendahnya upah dan tingginya biaya pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum memihak pada buruh. Sebagai gambarannya, Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp. 900.000 (UMR tahun 2007). Sementara setiap bulan mereka harus mengeluarkan biaya pendidikan untuk persatu anak mencapai Rp. 250.000 sampai Rp. 350.000 setiap bulannya, yang terdiri dari iuran bulanan sekolah, buku dan pengeluaran sekolah lainnya, dan transportasi.¹² Belum lagi ditambah pengeluaran uang jajan anak di sekolah, tentu semakin berat saja bagi masyarakat yang khususnya berpenghasilan UMR maupun dibawah UMR. Sementara Justin M. Sihombing menambahkan, ketimpangan ekonomi berimplikasi pada ketidakmerataan akses untuk menikmati pendidikan yang layak.¹³ Inilah bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia akibat kapitalisme pendidikan. Atas keironisan ini Tan Malaka menuliskan, “keadilan di Indonesia hanya bagi segolongan kecil, yaitu si penjajah

Bantuan, dan Komite Sekolah, (Jakarta: Kerjasama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 2007), hal. 26.

¹² *Ibid.*, hal. 29-30.

¹³ Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, (Yogyakarta: Narasi, 2005), hal. 84.

(orang yang kuat). Bagi bangsa Indonesia yang berhak atas negeri itu, tak ada keadilan dan pengadilan”.¹⁴

Biaya pendidikan yang mahal tentu berkorelasi dengan tingkat kemampuan ketercapaian manusia dalam mengakses pendidikan. Artinya, bagi masyarakat miskin tentu akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang tinggi. Akhirnya kewajiban belajar 12 tahun harus terputus di tengah jalan dan bahkan tidak sama sekali mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan. Atas kemirisan ini Soe Hok Gie menuliskan,

Falsafah pendidikan nasional menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat ditolak untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi atas alasan-alasan material, ya karena misalnya ia miskin. Karena itu sekolah-sekolah yang memungut iuran sekolah yang terlalu tinggi bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional. Sekolah-sekolah semacam “pintu air” akan menimbulkan klasifikasi antara sekolah-sekolah untuk orang kaya dan miskin. Apakah yang lebih tidak adil selain daripada mendidik sebagian kecil anak-anak orang kaya dan membiarkan sebagian besar rakyat miskin tetap bodoh?¹⁵

Sementara berdasarkan hasil penelitian penulis, dampak dari putus sekolah berkaitan dengan tingkat pengangguran. Masalah pengangguran kemudian dialihkan dalam aktivitas yang menyimpang, seperti mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Salah satu wilayah

¹⁴ Tan Malaka, *Aksi Massa, Op.Cit.*, hal. 69, (keterangan tutup kurung ditambahkan penulis sebagai kontekstualisasi kondisi kekinian).

¹⁵ Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demontran, Op.Cit.*, hal. 153.

yang menjadi “korban” kapitalisme pendidikan yaitu jalan Jaya 2 Rt.006/014 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari 706 jiwa penduduk yang tinggal di wilayah jalan Jaya 2 Rt.006/014, diantaranya 30% usia remaja (15 tahun-25tahun), dan hampir 20% remaja putus sekolah, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah. Maka otomatis lapangan kerja untuk mereka terbatas pada bidang tertentu. Hasil pengamatan penulis, sekitar 10% remaja di wilayah itu tidak bekerja atau pengangguran. Bahkan akibat dari pengangguran ini, sebagian remaja ini melakukan tindakan minum-minuman keras (miras) sebagai pengalihan sosial atas frustrasi situasi dan kondisi sosialnya.¹⁶

Kalau sudah seperti ini, mau dibawa ke mana masa depan generasi muda Indonesia? Permasalahan putus sekolah memang menjadi masalah yang serius. Pasalnya putus sekolah diakibatkan karena ketidakmampuan biaya masyarakat dalam membiayai sekolah anak-anaknya. Padahal kita ketahui, UUD RI 1945 mengamanatkan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi juga menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yakni mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, untuk

¹⁶ Syaifudin, *Ketidakberfungsian Lembaga Pemerintah Terhadap Masalah Putus Sekolah di Jalan Jaya 2 Rt.006/014 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat*, (Jakarta: Karya Tulis Ilmiah Program Kreativitas Mahasiswa-Dikti, Tidak diterbitkan, 2009).

meningkatkan kualitas hidupnya. Namun nyatanya dalam kehidupan sehari-hari masalah pendidikan tetap menyisakan masalah pelik. Angka anak putus sekolah yang tinggi menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan nasional. Alhasil, sebagian dari mereka ada yang ikut membantu mencari nafkah bagi orang tuanya, menjadi gelandangan, dan atau menjadi bagian dari organisasi kejahatan.

Pendidikan akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Pendidikan yang sejatinya sebagai pengurai kemiskinan dan harapan keadilan, justru sebaliknya semakin memperburuk masalah tersebut. Menurut Mahbub ul Haq kapitalisme yang menderah dunia ketiga (salah satunya Indonesia) membuat tirai kemiskinan semakin menjadi-jadi. Mahbub ul Haq secara sosiologis mengemukakan,

Tirai kemiskinan telah turun di muka bumi, membelahnya, dari segi kebendaan dan pandangan hidup, menjadi dua dunia berbeda, dua planet terpisah, dua kelompok manusia tidak sederajat, yang satu teramat kaya, yang lain sangat melarat...Bagi negara-negara dunia ketiga...Berjuang menguak tirai kemiskinan adalah tantangan terberat yang kita hadapi di masa sekarang ini.¹⁷

Apa yang salah dengan pendidikan Indonesia? Bukankah banyak teoritis menyatakan bahwa pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan? Salah satunya sastrawan Pramoedya Ananta Toer

¹⁷ Mahbub ul Haq, *Tirai Kemiskinan*, penerjemah Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983), hal. 7.

yang optimis dengan dunia pendidikan, ia mengatakan, “salah satu jalan pemutus lingkaran kemiskinan adalah dengan pendidikan yang tinggi. semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas”.¹⁸

Pernyataan Pramoedya Ananta Toer tentu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkannya. Karena kapitalisme pendidikan telah merenggut segala hak-hak kaum miskin untuk dapat mengakses pendidikan formal pada khususnya. Efek domino dari kemiskinan akhirnya memicu berbagai tindakan kriminalitas dan kekerasan. Maka tidak heran, di masa ini berbagai fenomena kekerasan terjadi di mana-mana. Pendidikan yang idealnya melahirkan manusia yang humanis dan beradab harus tereduksi oleh kapitalisme. Tidak ada kedamaian yang tercipta, yang ada berbagai gelombang kekerasan di bumi Indonesia dengan pijakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan filosofis Muhammad Yunus seorang peraih nobel perdamaian tahun 2006 mengungkapkan,

Perdamaian harus dipahami secara manusiawi. Perdamaian terancam oleh tatanan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak adil...Kemiskinan adalah absennya seluruh hak azasi manusia. Frustrasi, permusuhan dan kemarahan yang disebabkan oleh kemiskinan akut tidak bisa memupuk perdamaian dalam masyarakat manapun.¹⁹

¹⁸ Lihat uraian Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*, (Jakarta: Hasta Mitra, 1980), hal. 138.

¹⁹ Sambutan Muh. Yunus dalam pidato penerimaan penghargaan nobel perdamaian 2006, dalam Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, (Depok: Marjin Kiri, 2007), hal. 263.

Sementara mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, bahwa konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena ketidakadilan. Hal ini senada dengan apa yang diyakini Marx, pertentangan setiap manusia pada dasarnya karena ketidakadilan. Ruang ketidakadilan di sini dapat berupa hak sipil, sosial, ekonomi maupun politik. Secara sosiologis, silsilah ketidakadilan berada pada titik kulminasi akar pemicu konflik.

Proses ketidakadilan akhirnya memproduksi sebuah adegan kekerasan. Adegan kekerasan itu merupakan wujud konkret dari sebuah konflik akut. Misalnya saja seperti konflik di Tarakan Kaltim, kerusuhan di Ampera Jaksel serta kasus Ahmadiyah di Bogor. Setidaknya kasus tersebut menjadi refleksi kita bersama. Apakah ini watak dan budaya yang ada pada masyarakat kita sekarang ini. Dari sudut pandang subyek, kekerasan dari konflik akut lebih banyak diperankan oleh masyarakat bawah (*grassroot*).

Kesenjangan akibat ketidakadilan yang berujung kekerasan massa merupakan konsekuensi sosial. Dan kiranya ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi negara. Jika kesenjangan ini semakin lebar, dipastikan kekacauan sosial akan semakin tinggi. Hal ini ditandai dengan terciptanya masyarakat anomali.

Kemiskinan struktural yang tidak mampu diakomodasi oleh pendidikan Indonesia terus melahirkan berbagai serangan-serangan balik bagi kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat maupun negara Indonesia. Kapitalisme pendidikan secara langsung telah menciderai kehidupan demokrasi di era reformasi ini. Mau tidak mau ini harus segera disadari baik oleh masyarakat, dan khususnya pemerintah. Di mana pendidikan tidak dijadikan barang komoditi semata, tetapi justru dijadikan alat untuk menghasilkan peradaban dan bangsa yang berkualitas. Untuk itu pendidikan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Harbison dan Myers yang dikutip oleh Winarno Surakhmad mengatakan,

Pembangunan bangsa-bangsa modern tergantung pada pengembangan sumber daya manusia dan organisasi aktivitas manusia. Modal, sumber daya alam, bantuan luar negeri, dan perdagangan internasional, tentu saja memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada tenaga manusia ...Semua studi pembangunan mengakui pentingnya faktor sumber daya manusia sebagai titik keberangkatan.²⁰

Lebih lanjut H.A.R. Tilaar menambahkan,

Pembangunan di negara-negara berkembang dewasa ini termasuk Indonesia sedang memasuki masa sulit akibat krisis ekonomi yang parah. Belajar dari pengalaman pahit dalam krisis tersebut meyakinkan kita bahwa yang menjadi pusat

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional; Strategi dan Tragedi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 202.

pembangunan ialah manusia Indonesia itu sendiri...Dengan demikian manusia merupakan titik sentral dari pembangunan nasional kita...Dengan demikian apabila pendidikan nasional merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia Indonesia, maka tujuan pendidikan nasional tidak lain daripada membangun manusia-manusia Indonesia unggul yang dapat survive menghadapi berbagai krisis.²¹

Uraian teoritis di atas menyiratkan bila suatu negara tidak dapat mengembangkan sumber daya manusianya, maka negara tersebut tidak dapat mengembangkan apa pun baik sistem politik, kesatuan bangsa dan kemakmuran rakyatnya. Sementara proses pengembangan sumber daya manusia sendiri inheren dengan dunia pendidikan. Maka sudah sangat jelas, pendidikan harus dimanusiawikan dan diletakkan sebagai sesuatu yang vital dalam memproduksi manusia Indonesia yang beradab dan bermartabat, dan bukan dipandang sebagai “mesin” penghasil keuntungan kapital.

Contoh nyata lainnya dari kapitalisme pendidikan yaitu adanya dikotomi sekolah. Bentuk dikotomi sekolah itu antara lain Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan sekolah biasa. Jelas dikotomi ini merupakan bentuk semangat kapitalis dalam dunia pendidikan. Bentuk pendidikan yang dikotomi berdasarkan determinasi ekonomi, tidak dipungkiri akan melahirkan kelas-kelas sosial sebagai implementasi ide kapitalis dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan akhirnya

²¹ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hal. 14.

didasarkan atas modal dan bukan keadilan. Untuk itu Bourdieu mengemukakan, “dalam masyarakat modern sekolah telah menjadi instansi yang paling penting bagi reproduksi sosial di hampir semua kelas sosial”.²²

Atas adanya dikotomi sekolah, tidak jarang kita saksikan berbagai ketimpangan fenomena sosial yang memprihatinkan. Misalnya, jika ada SBI atau minimal Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang bersebelahan dengan sekolah biasa, akan kita saksikan kesenjangan sosial yang sangat nyata. Halaman parkir sekolah SBI dipastikan akan penuh dengan mobil dan seluruh peserta didik masuk sekolah dengan membawa laptop, dan *handphone* mahal sebagai simbol atas kelas sosialnya. Sebaliknya di sekolah biasa, para peserta didik hanya diantar dengan sepeda motor, naik angkutan kota, bahkan jalan kaki. Jarang sekali yang menenteng laptop atau membawa *handphone* seharga jutaan rupiah.

Kesenjangan lain yaitu dalam hal pelayanan pendidikan. Antara SBI atau RSBI dan sekolah biasa, pelayanan pendidikan terlihat dari perbedaan sarana dan prasarana. Bagi SBI atau RSBI, fasilitas pendidikan tersedia secara lengkap dengan kualitas pengajaran yang bermutu pula. Sedangkan bagi sekolah biasa, fasilitas pun seadanya dan

²² Roy Nash, “*Bourdieu on Education and Social and Cultural Reproduction*” in *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 11, No. 4, 1990, hal. 432.

kualitas pengajaran pun terbilang biasa. Fakta lainnya, dalam catatan *Indonesia Corruption Watch*, pada tahun 2003 beberapa bangunan sekolah biasa di Jakarta seperti SDN Kwitang, SLTPN 80 Halim, dan SLTPN 22 Jembatan Besi, roboh. Dinas Pendidikan Dasar (Diknas) DKI Jakarta memperkirakan sekitar 68 SDN dan 50 SLTPN dalam kondisi rawan rusak.²³ Sementara sekolah yang memiliki modal besar justru terus “bersolek” dengan bangunan fisik yang megah dengan segala fasilitas pendukung di dalamnya.

Kesenjangan fenomena tersebut merupakan bentuk nyata dari pengejawantahan gagasan kapitalisme dalam dunia pendidikan. Ironisnya, cengkeraman kapitalisme diamini oleh para *stake holder* pendidikan nasional melalui segala bentuk regulasi yang dibuatnya. Untuk itu H.A.R. Tilaar menilai kebijakan dan praktik pendidikan nasional kini telah mengkhianati cita-cita proklamasi 1945.²⁴ Lebih spesifik Soedijarto menambahkan, keterpurukan kondisi negara-bangsa Indonesia karena dipengaruhi oleh ketidakberfungsian pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 serta pasal 32.²⁵ Padahal jauh sebelum UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 berlaku sekarang, Presiden Soekarno melalui

²³ Ade Irawan dkk., *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah*, *Op.Cit.*, hal. 3.

²⁴ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), hal. 14.

²⁵ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 13.

Penetapan Presiden RI nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila merumuskan tujuan pendidikan Indonesia berdasarkan manifesto politik-UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia (USDEK). Di mana manusia sosialis Indonesia adalah cita-cita utama setiap usaha pendidikan di Indonesia, dan kepentingan kehidupan pribadi agar dinomorduakan, dan lebih difokuskan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, jauh sebelum masalah di atas semakin “kusut”. Tan Malaka sudah mengingatkan bangsa ini untuk tidak coba-coba menenggelamkan diri dari kubangan kapitalisme. Tan Malaka meyakini bahwa kapitalisme akan membawa dampak negatif lebih besar daripada positifnya.

Kekayaan dan kekuasaan sudah tertumpuk ke dalam genggamannya beberapa orang kapitalis. Rakyat Indonesia semuanya makin lama semakin miskin, melarat, tertindas dan terkungkung. Pertentangan kelas dan kebangsaan makin lama semakin tajam.²⁶

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai kapitalisme pendidikan. Secara antitesis Tan Malaka mengajukan pendidikan sosialitis sebagai relevansi atas praktik pendidikan kontemporer Indonesia yang kini sudah terjangkit “virus” kapitalisme. Diktum Tan

²⁶ Tan Malaka, *Aksi Massa, Op.Cit.*, hal. 90.

Malaka mengenai pendidikan sosialis, yaitu pendidikan harus menjadi panglima bagi pembangunan nasional. Pendidikan berasaskan kerakyatan, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjamin segala hak serta potensi peserta didik.

Bahwa sekolah SI bukan seperti sekolah particulier yang lain-lain, yakni pertama sekali buat mencari keuntungan, bolehlah kita buktikan dengan bermacam-macam jalan. Bukan saja karena ongkos buat uang sekolah adalah lebih enteng, dan pengajaran ternyata lebih baik...anak-anak suka bekerja keras untuk mencari kepandaian, yang perlu kelak buat keperluan hidup (seperti membaca, menulis, berhitung, bahasa dsb) pada dunia kemodalan...Itu memang kewajiban kita sebagai gurunya, supaya kelak anak-anak...cukup membawa senjata untuk perjuangan kelak dalam hal mencari pakaian dan makanan buat anak istrinya.²⁷

Lebih lanjut Tan Malaka menambahkan, “kemerdekaan rakyat hanyalah bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan, (dalam) menghadapi kekuasaan kaum modal yang berdiri atas didikan yang berdasarkan kemodalan”.²⁸ Dalam pandangan Tan Malaka, pendidikan idealnya tidaklah mencari keuntungan secara materi. Korelasi pendidikan dengan ekonomi harus dibangun berdasarkan prinsip kerakyatan. Pembangunan ekonomi tidak serta merta menjadikan pendidikan sebagai target akumulasi kapital yang potensial. Namun pada kenyataannya, prinsip pembangunan ekonomi mengorbankan

²⁷ Tan Malaka, *S.I. Semarang dan Onderwijs, Op.Cit.*, hal. 3-4.

²⁸ *Ibid.*, hal. ii.

keadilan dalam bidang akses pendidikan. Alhasil, pendidikan pun menjadi santapan “lezat” bagi para kapitalis. Terkait hal itu, maka dengan tegas Marx menyatakan bahwa seharusnya akses pendidikan menjadi hak semua anak.²⁹

Untuk menghadapi kekuasaan kaum kapitalis, pendidikan kerakyatan harus dibangun sebagaimana mestinya. Pemaparan-pemaparan mengenai dampak kapitalisme pendidikan kiranya sudah cukup jelas untuk merelevansikan pendidikan sosialis yang dikemukakan Tan Malaka. Bahkan menurut Tan Malaka, pendidikan yang berbasis kerakyatan adalah harga mati, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan tegas Tan Malaka mengatakan, “jalankan keadilan meskipun langit akan runtuh!”³⁰

6.2.2. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial dalam Regresi Mentalitas Sosial

Tahun demi tahun pasca jatuhnya rejim orde baru, Indonesia sarat dengan berbagai perilaku menyimpang. Sering kita saksikan di berbagai media massa, berita mengenai bentuk-bentuk penyimpangan sosial seperti kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, tindakan “main hakim sendiri”, pencurian dan perampokan dalam berbagai lapisan

²⁹ Uraian mengenai program-program revolusioner dalam Karl Marx, and Friedrich Engel, *Manifesto of the Communist Party*, *Op.Cit.*, hal. 35.

³⁰ Tan Malaka, *Aksi Massa*, *Op.Cit.*, hal. 69.

masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Secara teoritis J.W. Van Der Zanden mengemukakan, perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi. Dalam konteks Indonesia kini, rentetan perilaku menyimpang itu dapat digolongkan sebagai patologi sosial. Karena masalah tersebut sudah mengancam tatanan sosial yang kelak dapat melahirkan disintegrasi sosial.

Fenomena nyata yang kini marak terjadi yaitu perilaku menyimpang yang berkaitan dengan kuatnya keyakinan religius tertentu atau fanatisme altruis, seperti tindakan agresif yang didasari oleh dorongan untuk membela keyakinan, baik berupa perkelahian massal yang memakan korban jiwa maupun teror dengan bom. Perilaku agresif yang brutal dan spontan seperti membunuh kawan sendiri tanpa alasan yang jelas dan mengamuk karena merasa terhina, bahkan membunuh anak sendiri karena alasan kemiskinan atau frustrasi.

Bentuk penyimpangan lain seperti ingin kaya dengan jalan korupsi, lulus lewat menyontek, menjadi sarjana dengan membeli ijazah dan persaingan tidak sehat. Lalu kita temukan juga tindakan prasangka yang mewabah seperti tindakan main hakim sendiri secara massal dengan memukuli atau membakar pelaku kejahatan sampai

mati, penghancuran tempat-tempat hiburan oleh massa dan kepanikan massal akibat ketakutan berlebihan pada satu hal tertentu. Effendy sebagaimana dikutip oleh Liliweri mengemukakan,

Prasangka seperti ini merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi kegiatan komunikasi, karena orang yang berprasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang. Dalam proses tersebut, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan yang negatif, tanpa menggunakan pikiran dan pandangan berdasarkan fakta yang nyata.³¹

Ironisnya, segala perilaku menyimpang ini terjadi serentak di Indonesia dalam waktu yang berdekatan. Dengan kata lain, secara sosiologis masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu proses anti-sosial. Proses anti-sosial merupakan suatu proses yang bersifat individualis atau tidak memiliki sikap peduli dengan sesama, altruisme yang berlebihan dan memandang kelompok atau orang lain rendah, cenderung menentang nilai dan norma sosial yang berlaku, serta agresif.

Menguatnya mentalitas anti-sosial dan melemahnya mentalitas sosial secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah melemahnya peran pendidikan dalam membentuk sikap sosial manusia sebagai subordinasi masyarakat. Sementara rumusan teoritis mengenai faktor ini lebih lanjut dikemukakan oleh Zastrow.

³¹ Lihat uraian lengkapnya dalam Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 200-201.

Menurutnya ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: (1) upaya mempertahankan ciri kelompok etnik/ras secara berlebihan; (2) frustrasi, agresi, kekecewaan yang mengarah pada sikap menentang; (3) ketidaksamaan dan kerendahdirian; (4) kesewenang-wenangan; (5) alasan historis; (6) persaingan yang tidak sehat dan menjurus ke eksploitasi; (7) cara-cara sosialisasi yang berlebihan; dan (8) cara memandang kelompok lain dengan pandangan sinis.³²

Dalam faktor lain, proses imitasi sosial pada figur tertentu turut menyumbang konstruksi sikap anti-sosial. Mengapa? Figur yang dinilai patut ditiru justru sebaliknya memberikan contoh perilaku yang menyimpang, sehingga perilaku ini secara psikologis turut mempengaruhi cara berpikir dan tindakannya. Misalnya, figur politik yang justru memberikan perilaku yang anti-sosial, saling bertikai, mementingkan kursi kekuasaan dan berkinerja buruk di parlemen. Pejabat dan mantan pejabat banyak diduga terlibat kasus KKN. Secara ekstrem FX Rudi Gunawan mengemukakan, “lebih baik moral seorang pelacur daripada politikus”.³³

Sementara pada figur selebritis pun tidak jauh beda dengan figur politikus. Selebritis banyak menampilkan gaya hidup non-produktif dengan kondisi rumah tangga kacau balau tanpa contoh-

³² *Ibid.*, hal. 203-204.

³³ Lihat uraian FX Rudi Gunawan, *Pelacur dan Politikus*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 214-215.

contoh konstruktif. Bahkan adegan pornografi selebritis yang kemudian terekspos ke publik, tidak sedikit media massa memberitakan banyak generasi muda yang menirunya. Secara kritis atas fenomena ini Nurani Soyomukti mengungkapkan,

Tak usah heran dengan tayangan video mesum...Tak usah heran dengan liberalisme seksual di kalangan artis-selebritis. Karena itu adalah peristiwa yang selalu berulang, terjadi berkali-kali, dan tak lebih dari kejadian yang harus kita kaitkan dengan suatu hal yang nyata dan material. Tak usah selalu dan selalu kita kaitkan dengan moral dan agama. Sebab moral bukanlah sebab, tetapi produk. Jika moral adalah ukuran baik-buruk, maka kita harus menganalisis hal yang nyata dan material, yang menyebabkan kenapa kebaikan terjadi dan kenapa keburukan dilakukan.³⁴

Pada level figur pemuka agama pun tidak jauh berbeda. Tak sedikit dari para pemuka agama turut memberikan kesan perilaku intoleransi terhadap kelompok kepercayaan lain, memaksakan keyakinannya untuk dijadikan dasar kehidupan bernegara, serta lebih bahayanya yaitu memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan dan tidak manusiawi. Bahkan ironisnya, wilayah agama di masyarakat kontemporer sudah terkontaminasi oleh politik kepentingan. Sehingga ajaran agama kian jauh dari kesan kedamaian yang sejatinya mengajarkan hal tersebut. Kedewasaan praktik keagamaan ini menurut Eko Prasetyo,

³⁴ Nurani Soyomukti, *Membongkar Aib Seks Bebas dan Hedonisme Kaum Selebriti. Pilihan Jalan: Meluna atau Merieke*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), hal. 105-106.

Di tengah krisis seperti ini, bisnis komplotan baik itu yang mengatas-namakan etnis atau ummat kini menjadi ladang subur untuk menanggung keuntungan. Di sinilah gerakan agama bisa terjatuh pada gerakan kaum bandit, yang melakukan kekerasan sembari membawa-bawa nama Tuhan. Kepentingan yang dipicu pada permukaan seolah-olah mulia, padahal itu hanya “pemanis” dari kepentingan-kepentingan ekonomi-politik yang saling bergesek. Agama kemudian menjadi celah untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan sebuah kelompok.³⁵

Melihat berbagai penetrasi pembentukan karakter anti-sosial yang deras terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kiranya perlu segera direparasi. Intervensi sosial diperlukan dalam menghasilkan citra mentalitas sosial yang sesuai, seperti kaum elite politik yang menunjukkan kearifan dan kesalehan sosial, program televisi yang menayangkan inspirasi dalam pembentukan mentalitas sosial, dialog-dialog yang simpatik, terbuka, argumentatif dan harmonis antara tokoh-tokoh agama, dan yang terpenting adalah bagaimana pendidikan berperan secara maksimal dalam mengonstruksi mentalitas sosial.

Untuk membangun mentalitas sosial yang sedang terancam ini, menurut Tan Malaka tidak ada cara lain kecuali dengan merekonstruksi jiwa-jiwa sosial ini melalui pendidikan. Senada dengan Tan Malaka, Djohar pun meyakini pembentukan karakter bangsa dan sosial ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang

³⁵ Eko Prasetyo, *Islam Itu Agama Perlawanan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal. 62.

kontekstual atau transformatif.³⁶ Sementara secara sistematis H.A.R.

Tilaar mengungkapkan,

Alangkah baiknya apabila perubahan-perubahan yang menantang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia secara saksama diikuti dan dicermati agar supaya arah pendidikan nasional yang akan membawa generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dapat dibina berdasarkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang jelas dan konsisten atau berkesinambungan.³⁷

Sebagaimana dalam filsafat manusia Tan Malaka, bahwa pada dasarnya manusia makhluk yang berpikir dan makhluk sosial. Maka kiranya orientasi pendidikan yang kini menjauhkan mentalitas sosial manusia dalam dunia globalisasi dan demokrasi, harus kembali diformat ulang pada kerangka sosial yang tepat. Bagi Tan Malaka dalam proses pembentukan mentalitas sosial ini, harus dilakukan proses pendidikan yang berbasis realitas sosial. Ini juga yang diyakini oleh para pengamat pendidikan modern seperti John Dewey, Freire, Bourdieu sampai H.A.R. Tilaar.

John Dewey mengutarakan bahwa dalam “pendidikan anak harus dikembangkan kecerdasan sosialnya sebagai perubahan radikal dalam fondasi dan tujuan hidupnya guna menjadi manusia yang

³⁶ Djohar, *Pendidikan Strategik Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 121.

³⁷ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Dalam Perspektif Abad 21*, *Op.Cit.*, hal. 13.

demokratis”.³⁸ Freire menambahkan, “pendidikan yang membebaskan akan membentuk keyakinan manusia bahwa dirinya merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan manusia lain dalam menjalani aktivitas kehidupannya”.³⁹ Sementara secara sosiologis Bourdieu menyatakan, “tugas mendasar dari sekolah adalah untuk memungkinkan peserta didik belajar memahami sifat dari dunia sosial dan materialnya”.⁴⁰

Sedangkan bagi H.A.R. Tilaar secara kontekstual, pendidikan nasional perlu direformasikan dalam rangka untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang bersatu dan demokratis atau masyarakat yang berdaya.⁴¹ Keempat pandangan tokoh pendidikan ini secara prinsip memiliki tujuan yang sama yaitu pendidikan tidak semata membangun kecerdasan kognitif semata tetapi juga sosial, sehingga terbentuklah mentalitas sosial yang menginternalisasi aspek-aspek kemanusiaan dan sikap peduli serta menghargai satu sama lain. Dengan demikian, pendidikan menunjukkan peran strategisnya bagi proses kehidupan individu khususnya, dan bangsa pada umumnya. Sebagaimana yang dikemukakan Soedijarto, “pendidikan sebagai proses pembudayaan yang hakikatnya merupakan pembangunan

³⁸ Lihat uraian Dewey dalam Robert B. Westbrook, *John Dewey and American Democracy*, (USA: Cornell University Press, 1991), hal. 173.

³⁹ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, *Op.Cit.*, hal. 129.

⁴⁰ Roy Nash, “*Bourdieu on Education and Social and Cultural Reproduction*”, *Op.Cit.*, hal. 437.

⁴¹ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Dalam Perspektif Abad 21*, *Op.Cit.*, hal. 25.

karakter manusia Indonesia sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa”⁴².

Melalui pendidikan yang memadai serta berbasis realitas sosial, maka mentalitas sosial dapat dikembangkan. Hal ini sudah dibuktikan Tan Malaka, baik melalui sekolah S.I. maupun bentuk pendidikan tanpa sekolah yang dilakukannya. Terbukti dari ide pendidikan ini dapat menghasilkan manusia-manusia yang tangguh dalam menyelesaikan masalah zamannya dan memberi kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan manusia melalui proses kemerdekaan Indonesia.

Penulis mencoba mengulangnya kembali, konteks yang dimaksud pendidikan berbasis realitas sosial yang dimaksudkan Tan Malaka yaitu praktik pendidikan yang berusaha mendekatkan peserta didik pada pemahaman realitas yang sebenarnya melalui penyadaran kritis serta transformatif. Bentuk konkritnya yaitu peserta didik terjun untuk mengamati secara langsung realitas yang ada dan kemudian dielaborasi melalui diskusi kritis sehingga membentuk kesadaran kritisnya, dan tahapan tertingginya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dalam bentuk tindakan nyata. Tan Malaka menuliskan,

⁴² Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, *Op.Cit.*, hal. 15.

Memandang rendah pada pekerjaan tangan...itulah yang mau kita perangi dengan sekuat-kuatnya. Anak-anak mesti cinta pada segala macam pekerjaan yang disahkan (halal). Sesudah kita bisa buang sifat didikan yang bisa mendatangkan benci pada kaum Kromo (yang kerja tangan atau buruh) itu, maka harus kita perhubungkan anak-anak kita dengan kaum melarat. Itulah gunanya, kalau ada tempo kita membicarakan nasib si kromo; kita menanam hati belas kasihan sama bangsa yang tertindas; kita menunjukkan kewajiban sebagai anak kaum yang tertindas itu. Sebab itulah kita membangunkan hatinya... inilah suatu sekolah, yang besar artinya untuk mendidik rasa dan hati mereka; mendidik untuk memikirkan dan menjalankan peraturan buat pergaulan hidup, mendidik untuk fasih dan berani bicara, didikan mana dalam zaman perbudakan ini lebih besar harganya dari pada mengetahui, berapa banyaknya sungai-sungai di pulau Borneo umpamanya. Kalau kita bisa menyabungkan perkumpulannya dalam sekolah itu dengan perkumpulannya ibu bapaknya...maka rasanya kelak, kalau ia keluar sekolah tidak akan berpisah dengan ibu bapaknya itu.⁴³

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa dalam proses pendidikan, manusia bukanlah dibentuk untuk menjadi feodal, apatis dan anti-sosial, melainkan sebaliknya. Manusia dibentuk untuk memiliki sikap mau bekerja keras, menghormati perbedaan, empatif-humanis dengan sesama, serta mengkonstruksi mentalitas sosial dalam diri peserta didik. Apabila proses pendidikan berbasis realitas sosial ini dilakukan, maka kata Tan Malaka,

Sehingga, kalau ia kelak menjadi besar, maka perhubungan pelajaran sekolah...dengan ikhtiar hendak

⁴³ Konteks ibu-bapaknya tidak hanya ditafsirkan dalam relasi harmonis orangtua dan anak. Tetapi juga antara manusia individu dengan individu lain, bangsa dan negaranya. Tan Malaka, *S.I. Semarang dan Onderwijs, Op.Cit.*, hal. 18-19.

membela rakyat tidak dalam buku atau kenang-kenangan saja, malah sudah menjadi watak (karakter) dan kebiasannya masing-masing.⁴⁴

Pembangunan karakter bangsa yang bermental sosial kiranya menjadi salah satu upaya dalam menenggarai masalah regresi mentalitas sosial yang kini sedang dihadapi bangsa ini dalam kemelut era demokrasi dan globalisasi. Maka untuk itu, pendidikan partisipatoris yang berbasis realitas sosial kiranya perlu diagendakan dan diimplementasikan dalam pendidikan nasional sebagai upaya peningkatan kesadaran tentang perlunya mentalitas sosial. Sehingga upaya ini membimbing peserta didik dalam memahami berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungannya, dengan disertai kepekaan sosial.

Apalagi bagi seorang mahasiswa, ilmunya tidaklah semata bermanfaat buat dirinya tetapi juga masyarakat. Sama halnya dengan Tan Malaka, Soe Hok Gie juga menginginkan agar manusia yang mendapat pendidikan untuk dapat peduli dengan manusia lainnya sebagai sebuah pengabdian keilmuan.

Saya membayangkan seorang mahasiswa antropologi, yang berusia sembilan belas tahun datang dengan cita-cita untuk membuat *field work* di pedalaman Kalimantan atau Irian Barat. Atau seorang mahasiswa jurusan Kimia yang berfikir untuk menemukan sejenis cairan baru yang dapat

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 21.

melambungkan manusia ke bulan. Atau seorang mahasiswa hukum dengan ide-ide yang sarat dengan *rule of law*. Tidak ada yang lebih kejam dari pada mematahkan tunas-tunas semangat kemerdekaan berpikir dan berkreativitas. Dalam waktu beberapa tahun, pemuda berumur sembilan belas tahun ini mengetahui tak mungkin ada '*field work*' ke Irian Barat atau pedalaman Kalimantan. Ia harus puas dengan skripsi tentang masyarakat tukang buah-buahan di Pasar minggu. Dan alumnus Kimia benar-benar menyadari yang ada untuknya hanyalah kerja di pabrik sabun atau mentega. Pelan-pelan ia harus melupakan idealismenya tentang cairan yang dapat melontarkan manusia ke bulan. Lalu, si mahasiswa fakultas hukum mengetahui, bahwa di atas hukum terdapat hukum yang tidak tertulis.⁴⁵

Masyarakat Indonesia yang plural menuntut curahan tenaga dan pikiran yang sangat besar untuk dapat merumuskan kembali kesepakatan hidup bersama dalam negara Republik Indonesia. Pelibatan seluruh warga negara dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dapat memfasilitasi terbentuknya mentalitas sosial pada manusia Indonesia. Untuk itulah pendidikan harus dapat menumbuhkan kesadaran sosial berupa kepedulian terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

6.3. Manifesto Tan Malaka Atas Praktik Pendidikan Kontemporer di

Indonesia

Merefleksikan kembali segala capaian pembangunan nasional khususnya pendidikan, ternyata setelah puluhan tahun bangsa besar ini

⁴⁵ Stanley, & Aris Santoso (ed), *Soe Hok Gie, Zaman Peralihan, Op.Cit.*, hal. 96-97.

merdeka, pemerintah masih menetapkan pendidikan sebagai suatu yang etis atau tidak bagi segenap rakyatnya. Sebagai politik kolonial, proyek pendidikan sebatas meng“etis”kan masyarakat, membelakangi hakikat pendidikan yang lebih luas dari sekadar mensistemkan anak manusia. Indonesia memang sudah merdeka, akan tetapi bagaimana dengan dunia pendidikan Indonesia, sudah merdekakah?

Kita ketahui setiap olimpiade Internasional, Indonesia selalu meraih juara. Lantas, apakah ini menjadi indikator bahwa pendidikan Indonesia sudah berhasil dan merdeka? Kemerdekaan pendidikan Indonesia adalah kenyataan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses haknya dalam dunia pendidikan dan mengantarkan anak didik ke potensi yang dimilikinya. Merdeka atau tidak? Di saat pendidikan Indonesia tak berkuasa dihadapan modal kuat dari arus kapitalisme pendidikan.

Sebelumnya, dunia pendidikan Indonesia sempat digemparkan dengan berlakunya Undang-undang RI nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak argumen pro dan kontra yang mewarnai pelaksanaan UU BHP tersebut. Dalam pandangan yang pro, Fasli Djalal yang juga Wakil Menteri Pendidikan mengatakan bahwa UU BHP merupakan bentuk regulasi yang mengatur pendanaan di setiap lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi dan meningkatkan kapasitas serta mutu pelayanan

pendidikan. Sementara dalam pandangan kontra, H.A.R. Tilaar menilai BHP memiliki implikasi sebagai bentuk usaha lepas tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dan hanya melahirkan masalah daripada menjawab masalah. Kemudian Soedijarto menambahkan, UU BHP merupakan representasi neoliberalisme dalam dunia pendidikan.

Pendidikan memang wajib melengkapi kemandirian bagi keterampilan hidup anak manusia. Namun sejauh ini, penuntutan kemandirian tersebut mengambil langkah yang panjang, dalam BHP kemandirian di dunia pendidikan terpenggal sejauh lembaga pendidikan tak menggelayuti kantong anggaran pemerintah. Seakan otonomi beralih menjadi kata mujarab melepas tanggungjawab terhadap hak-hak rakyat dalam pendidikan. Lembaga pendidikan dapat dicap pailit atau bangkrut, dan dibebankan pula untuk memompa pendanaan sendiri. Alhasil, persaingan akan menggiring pendidikan kepada sejenis problem teknis, bukan filosofis bahkan praktis. Pendidikan dipersiapkan agar mengiyakan kebutuhan pasar dan menjawab permintaan konsumen, pendidikan akan kehilangan dimensi sosial serta pembangunan sosial masyarakat.

Layaknya penganut deisme, yang mempercayai Tuhan sebagai pencipta awal dunia, tapi selanjutnya tak campur tangan mengenai dunia. Begitupun pemerintah, setelah pembentukan permodalan awal di tiap lembaga pendidikan, tanggungjawab pemerintah dianggap lunas. Lembaga pendidikan

ke depan berwujud makhluk kanibal, memakan sesamanya bila perlu. Karena, di dalam BHP terdapat peluang permergeran dan pemailitan suatu lembaga pendidikan, bila suatu waktu lembaga pendidikan tak dapat melunasi utang dan sebagainya.

Bagi masyarakat miskin, pendidikan semakin menjepit, antara kebodohan dan ketidakmampuan ekonomi. BHP hanya menyiratkan lembaga pendidikan yang hanya wajib memperbolehkan 20% anak dari keluarga miskin menikmati pendidikan, selebihnya menjadi perhitungan kemanusiaan dari kebijakan sekolah ataupun universitas. Pikirkan, saat ini saja orang miskin menggapai angka separuh dari populasi rakyat Indonesia, apabila konsep ini terlaksana sebagian orang miskin bakal tinggal dalam kebodohan dan kemiskinan. Perihal hal tersebut, secara melankolis dan filosofis Ahmad Wahib mengungkapkan,

Aku tidak bisa mengerti keadaan Indonesia ini. Ada orang yang sudah sepuluh tahun jadi tukang becak, tidak meningkat-ningkat. Seorang tukang cukur bercerita bahwa ia sudah 20 tahun bekerja sebagai tukang cukur, penghasilan hampir tetap saja. Bagaimana ini? Apakah mereka tidak punya keghairahan untuk meningkatkan taraf hidupnya sedikit demi sedikit? Mengapa ada orang Indonesia yang sampai puluhan tahun menjadi pekerja-pekerja kasar yang sampai puluhan tahun...Tapi alangkah mencekam kebekuan pikirannya. Ia menyerah terhadap keadaan...Dengan modal pengetahuan yang lebih besar kita mendapat kans juga sekaligus untuk memiliki penghasilan yang lebih.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam...*, *Op.Cit.*, hal. 213-214.

Begitu kuatnya perdebatan mengenai UU tersebut, sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi pada 31 Maret 2010 memutuskan untuk membatalkan UU tersebut. Adapun landasan konstitusi pembatalan tersebut antara lain;

- warga negara Indonesia, mendapat jaminan perlindungan dan kesejahteraan dalam Pembukaan UUD 1945 dan pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pasal-pasal yang dimohonkan pengujian justru memberikan beban kepada masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan;
- bahwa kelas sosial dan usia anak untuk mengikuti pendidikan usia dini adalah bentuk diskriminasi yang diciptakan oleh UU Sisdiknas;
- UU Sisdiknas telah membatasi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan rumusan aturan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah hanya wajib menjamin biaya pendidikan dasar adalah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- Dengan keharusan dan beban 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional bagi peserta didik akan menyebabkan pendidikan menjadi mahal yang akan merugikan para Pemohon karena terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya;

- UU BHP telah memperlakukan peserta didik secara diskriminatif karena pemerintah hanya membiayai pendidikan dasar dan sebaliknya tidak mau menanggung biaya bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- UU BHP menyamakan pendidikan dengan perusahaan yang sewaktu-waktu dapat dipailitkan sehingga berpotensi membahayakan bagi keberlangsungan dan masa depan pendidikan di Indonesia;
- UU BHP dengan sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak mengarah pada komersialisasi pendidikan. Padahal, pencantuman prinsip-prinsip dalam UU BHP seperti prinsip nirlaba, otonomi, akses yang berkeadilan dan partisipasi atas tanggung jawab negara dalam UU BHP hanya merupakan tempelan dan ternyata bukan jiwa dari UU BHP itu. Prinsip-prinsip tersebut tidak terlihat dalam substansi UU BHP. Jiwa dan semangat UU BHP tetaplah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan dengan membawa para pelaku penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar. Pemerintah yang seharusnya menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan hanya ditempatkan menjadi fasilitator;
- Negara mereduksi peran dan kewajibannya dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat mencerdaskan seluruh bangsa yang syarat utamanya adalah seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki akses pendidikan. Biaya pendidikan yang mahal dan berorientasi pada modal akan menghalangi akses pendidikan untuk berbagai kalangan yang

tidak mampu. UU BHP memberikan kuota bagi masyarakat miskin, namun ternyata “jatah” tersebut adalah untuk orang-orang miskin yang berprestasi dan tidak kepada warga negara yang miskin namun tidak berprestasi;⁴⁷

Walaupun UU BHP dibatalkan, bagi para pengamat pendidikan ini dinilai tidak berarti pendidikan Indonesia bebas dari cengkraman liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Sebab pemerintah sedang membuat peraturan dan Undang-undang lainnya sebagai pengganti UU BHP. Namun yang jelas, indikasi komersialisasi pendidikan dapat kita lihat pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 77 tahun 2007.

Di lain sisi peraturan yang dibuat pemerintah dalam kebijakan Ujian Nasional (UN) terus melahirkan masalah-masalah yang kronis. Pada posisi guru, ia dihadapkan pada sebuah jurang profesionalitas yang dilematis. Jika peserta didik tidak lulus, sekolah akan malu, serta caci-maki dari semua pihak karena tidak “becus” mengajar, sehingga guru terpaksa melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu mendistorsi hasil jawaban peserta didik. Selain itu kecemasan peserta didik akan ketidاكلulusan membuat peserta didik melakukan segala cara, tak peduli berapa juta yang harus dikeluarkan agar dapat lulus UN. Misalnya saja dengan mengikuti berbagai jenis Bimbingan Belajar yang menjanjikan murid dapat lulus dan atau membeli kunci jawaban

⁴⁷ Lengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 mengenai putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

dengan modal yang besar. Tragis memang, tapi itulah buah dari kebijakan yang tidak impolisi.

Hal itu kemudian diperparah dengan sistem penjagaan yang ketat dengan menurunkan barisan polisi. Bahkan pada pelaksanaan UN tahun 2008 tak tanggung-tanggung detasemen khusus 88 anti teror diturunkan demi pengamanan pelaksanaan UN di sekolah-sekolah. Guru dianggap sebuah teroris yang membahayakan. Bahkan jika ada sekolah yang berani melakukan kecurangan dalam UN, maka lulusannya nanti harus di *black-list* jika mendaftar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Apakah kebijakan itu akan membawa dampak positif bagi pendidikan Indonesia? Memang harus kita akui bahwa pendidikan harus dijadikan pilar pembangunan manusia yang utama, sebab produk dari pendidikan adalah bangsa dan peradaban. Tapi apakah harus memperlakukan para guru dan murid seperti teroris atau tahanan politik?

Ironis jika melihat para pejabat melakukan tindakan korupsi, tapi mereka diperlakukan istimewa, sedangkan guru dan murid tak ubahnya dianggap seorang penjahat besar dibandingkan para koruptor yang memakan hak hidup ribuan rakyat Indonesia. Guru dan peserta didik adalah korban dari sejarah pendidikan yang dehumanisasi. Mereka dijadikan korban dari kepentingan elite negara. Hasil belajar peserta didik selama tiga tahun harus dipertaruhkan dalam waktu beberapa hari saja. Saat pengumuman hasil UN

tiba, banyak orang yang “*harap-harap cemas*”. Bagi yang lulus bersenanglah ia, tapi jika tidak impresi air mata akan menjadi saksi dari kekejaman sejarah persaingan hidup yang terjelma dalam dunia pendidikan, bahkan tidak sedikit peserta didik yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Lantas, apakah pendidikan kita harus terus-menerus seperti ini demi sebuah ambisi peringkat sehingga harus ada yang menjadi korban dari ambisi tersebut.

Atas kemelut pelaksanaan UN dalam pendidikan nasional, Soedijarto menuturkan bahwa UN merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. UN dinilai tidak berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. Lebih lanjut Soedijarto memberikan contoh perbandingan pelaksanaan sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) dan Jerman yang tidak menerapkan UN, namun berhasil dalam pembangunan karakter sumber daya manusianya. Pada negara AS dan Jerman, kebijakan pendidikan diterapkan dengan berdasarkan pengembangan potensi anak didik secara maksimal dengan cara: (1) menyediakan guru profesional, yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik; (2) menyediakan fasilitas sekolah yang memungkinkan peserta didik belajar dengan penuh kegembiraan ; (3) menyediakan media pembelajaran yang lengkap, yang memungkinkan peserta didik terus-menerus belajar dengan membaca buku wajib, buku rujukan, dan buku bacaan (termasuk novel), serta kelengkapan laboratorium dan perpustakaan yang

memungkinkan peserta didik belajar sampai tingkatan menikmati belajar; (4) evaluasi yang terus-menerus, komprehensif, dan obyektif, serta sekolah menjadi pusat pembudayaan berbagai kemampuan dan nilai seperti etos kerja, kedisiplinan, kejujuran, dan moral.⁴⁸ Melalui model pembelajaran seperti ini, AS dan Jerman mampu menghasilkan rakyat yang beretos kerja tinggi, berkualitas, dan gemar belajar. Kiranya model pendidikan tersebut dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi sekarang ini.

Apalagi pemerintah sedang mencanangkan dan menerapkan beberapa program nasional, seperti program industri ekonomi kreatif,⁴⁹ visi Indonesia maju 2030, serta program pengentasan kemiskinan tahun 2015.⁵⁰ Beberapa

⁴⁸ Lengkapnya lihat uraian Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Op.Cit., hal. 150-152.

⁴⁹ Dalam sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka *Trade Expo Indonesia* (TEI) di Pekan Raya Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2008 lalu. Presiden SBY menegaskan bahwa gagasan industri ekonomi kreatif merupakan sebuah persuasif bagi masyarakat untuk bertindak, berpikir dan bersikap kreatif dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global. Melalui bukunya Mauled Moelyono menguraikan pandangannya tentang pentingnya mensinergikan informasi, pengetahuan, kreativitas, dan talenta serta upaya memperkuat modal sosial dan modal intelektual sebagai aset nir fisik dalam era ekonomi kreatif. Lengkapnya lihat Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif: Antara Tuntutan dan Kebutuhan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

⁵⁰ Pada September 2000 dilakukan Konferensi Tingkat Tinggi Millenium yang diikuti para pemimpin dunia di Markas Besar PBB yang merumuskan program Millennium Development Goals (MDGs) dengan menghasilkan keputusan berupa delapan sasaran yang terikat waktu, yaitu harus dicapai pada tahun 2015. Kedelapan sasaran MDGs adalah: 1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan; 2. Pendidikan universal; 3. Kesetaraan jender; 4. Kesehatan anak; 5. Kesehatan ibu; 6. Penanggulangan HIV/AIDS; 7. Keberlanjutan Lingkungan, dan 8. Kemitraan Global. Lengkapnya lihat Budi Sulisty, dkk., *MDGs (Millennium Development Goals) Sebentar Lagi: Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010).

program ini kiranya tidak akan terlaksana apabila pendidikan tidak dimerdekakan dari segala bentuk komodifikasi. Sebab sebagaimana penjelasan penulis sebelumnya, bahwa pendidikan sangat inheren dalam pembangunan sumber daya manusia. Maka sekali lagi ditegaskan, pendidikan harus merakyat dan berkeadilan.

Terkait dengan itu, visi dan misi pendidikan Indonesia kiranya perlu direformasi dan diorientasikan kembali. Melihat urgensi tersebut, maka tidak salah kita berefleksi atas manifesto pendidikan Tan Malaka sebagai sebuah wacana dan referensi atas praktik pendidikan kontemporer di Indonesia. Adapun manifesto pendidikan Tan Malaka meliputi aspek makro dan mikro (didaktik). Dalam aspek makro, yaitu; *Pertama*, pendidikan harus bersifat merakyat atau sosialis, artinya dunia pendidikan mudah diakses bagi semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan terpencil di daerah pedalaman, baik dari segi biaya, fasilitas dan lokasi. *Kedua*, kebijakan pendidikan yang tepat dan konstruktif, guna terciptanya pendidikan yang efektif, relevan dan progresif. *Ketiga*, pendidikan harus dijadikan prioritas utama yang bersifat elaboratif. Sebab sesuatu yang dikerjakan secara setengah-tengah, maka hasilnya pun tidak optimal. *Keempat*, metode didaktik yang dapat meningkatkan kesadaran kritis dan transformatif anak didik atas realitasnya.

Sementara dalam aspek mikro, Tan Malaka merumuskan; *Pertama*, memberi senjata cukup, buat pencari penghidupan dalam dunia kemodalan (berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, Melayu, dan sebagainya). Dalam bahasa lebih sederhana pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang profesional, terampil, dan kapabel sesuai bidang keilmuan yang digelutinya. Peningkatan kemampuan bahasa asing namun tetap tidak memarjinalkan bahasa ibu sebagai modal menghadapi era globalisasi. Ringkasnya, pendidikan harus eklektik sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai sebagaimana mestinya. *Kedua*, memberi hak anak didik yakni kesukaan hidup dengan jalan pergaulan. Maksudnya, memfasilitasi anak didik agar berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya melalui organisasi ekstrakurikuler sekolah yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Ketiga, menunjukkan kewajiban kelak, terhadap berjuta-juta rakyat jelatah. Pendidikan dalam pengertian Tan Malaka, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan dan kepandaian otak saja. Melainkan, pendidikan harus mampu memberikan bekal pada peserta didik untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan harus mengkonstruksi mentalitas sosial peserta didik.

Semua itu akan terwujud, apabila didukung oleh semua elemen masyarakat, serta kesadaran akan arti pentingnya sebuah pendidikan. Program

ekonomi kreatif, visi Indonesia maju 2030, dan program pengentasan kemiskinan tahun 2015 akan dapat terlaksana dengan baik, apabila pendidikan tidak di anak tirikan dalam membangun sumber daya manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan nasib bangsa ini di masa depan akan terlihat dari bagaimana mengembangkan pendidikan bagi generasi bangsa itu sendiri. Kegagalan suatu bangsa dan hancurnya peradaban adalah kegagalan dunia pendidikan. Untuk itu, kemerdekaan pendidikan Indonesia harus menjadi prioritas dalam pembangunan Indonesia ke depan. Pendidikan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Karena pendidikan adalah transportasi menuju peradaban dan bangsa Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan mampu keluar dari belenggu lingkaran kemiskinan. *Education for all* merupakan senjata dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut manusia homeostatis

Semoga saja para *stake holder* nantinya dapat benar-benar memandang pendidikan bukan semata-mata sebagai barang komoditi. Tetapi sebagai alat untuk menciptakan tatanan bangsa yang berkualitas dan memiliki kearifan lokal. Tentunya dengan membumikan pendidikan sebagai hak semua rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tentunya dengan menciptakan pendidikan yang berkualitas, dan yang terpenting dapat terakses oleh semua lapisan masyarakat.

Sebagai penutup, jika pendidikan terus dikomersialisasikan dan dijadikan alat mencari keuntungan kapital bagi kepentingan elite dan kapitalis, Tan Malaka mengingatkan,

Kalau Rakyat sempurna sadar akan haknya sebagai manusia, maka semua pembuangan dan tutupan yang sewenang-wenang itu kelak segera akan dibalas oleh Rakyat sendirinya. Kalau umpamanya Pimpinan melarang perbuatan semacam itu, maka Pimpinan itu sendiri akan dilemparkan oleh Rakyat dan akan diganti oleh Rakyat sendiri dengan pimpinan baru.⁵¹

Hai Rakyat Melarat !!

Berapa lamakah lagi kamu mau menderita injakan dan tindasan semacam ini? Tiadakah kamu tahu bahwa sangat besar kekuatan mu yang tersembunyi? Tiadakah kamu insaf, bahwa kerukunanmu artinya kemerdekaan buat kamu dan keturunanmu? Beranikah kamu terus hidup dalam perbudakan dan menyarankan anak cucumu juga jadi budak ?⁵²

6.4. Ringkasan

Pendidikan merupakan salah satu tonggak yang bisa memajukan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya dalam pembukaan UUD 1945, *founding father* negara ini menuliskan dan menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, entah itu berupa pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Sementara dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 secara eksplisit disebutkan, tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

⁵¹ Tan Malaka, *Semangat Muda, Op.Cit.*, hal. 33.

⁵² *Ibid.*, hal. 36.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Walaupun begitu, pelaksanaan pendidikan nasional tidak serta-merta berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh amanat konstitusi. Kapitalisme dan westernisasi kiranya menjadi tantangan berat bagi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam kapitalisme, pendidikan terjerat dalam praktik komersialisasi. Alhasil, biaya pendidikan turut melambung tinggi karena orientasi pendidikan berjalan beriringan dengan pencarian keuntungan kapital yang lebih. Dampak yang sangat signifikan adalah terciptanya sistem stratifikasi sekolah.

Sistem stratifikasi sekolah dapat dilihat dalam bentuk pelabelan sekolah, yaitu unggulan wilayah, unggulan nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional, sekolah bertaraf internasional dan lain sebagainya. Untuk memasuki sekolah tersebut tidak hanya didasarkan pada kecerdasan otak semata, tetapi juga kemampuan finansial. Dengan adanya stratifikasi sekolah, maka tidak semua anak Indonesia dapat mengakses pendidikan, khususnya anak yang berasal dari golongan ekonomi ke bawah. Berawal dari disorientasi inilah, akhirnya esensi "*education for all*" sendiri kian jauh dari harapan.

Selain itu, kebijakan pendidikan yang tidak melihat aspek psikologi sosial anak didik, ternyata melahirkan masalah-masalah baru diluar konsep

ekonomi. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah tentang Ujian Nasional (UN). Setiap tahunnya disaat pengumuman hasil UN, tak sedikit anak didik yang mengalami frustasi sosial akibat hasil nilai UN yang didapatnya. Bahkan tragisnya, klimaks dari frustasi sosial tersebut adalah mengakhiri hidup dengan gantung diri atau meminum racun. Dapat dikatakan hasil proses pendidikan ternyata hanya melahirkan watak-watak manusia yang selalu mengalami ketakutan akan realitasnya. Menurut Marx, pendidikan sejatinya dapat memposisikan manusia pada esensi dan kemartabatan manusia yang sesungguhnya. Di sinilah bagi Joe Kincheloe dalam bukunya “*Critical Pedagogy*” yang dikutip oleh M. Agus Nuryatno mengungkapkan, “pendidikan tidak hanya berkutat pada pertanyaan seputar sekolah, kurikulum, dan kebijakan pendidikan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesetaraan”.⁵³

Sementara pendidikan Indonesia dalam konteks kebangsaan pun mengalami regresi. Hal itu disebabkan karena kuatnya gempuran budaya-budaya asing yang terpenetrasi dalam kehidupan anak didik atau *westernisasi*. Dan ironisnya, pendidikan atau sekolah tidak sanggup memfilterisasi atau membentengi anak didik akan kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa.

Pada konteks ini, menurut Tan Malaka pendidikan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan dan kepandaian otak saja. Melainkan, pendidikan harus mampu memberikan bekal pada anak didik untuk kelak

⁵³ M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis, Op.Cit.*, hal. 3.

mengabdikan ilmunya bagi kemajuan masyarakat serta cinta terhadap bangsa dan negaranya. Tan Malaka menegaskan, “jika kemerdekaan sudah diraih, tugas bangsa ini selanjutnya adalah mempertahankannya, jangan sampai kembali dijajah. Apabila kembali dijajah, bangsa ini tidak ubahnya seperti keledai”.

Konsep pendidikan Tan Malaka merupakan pendidikan kerakyatan dengan landasan sosialisme. Pendidikan harus bersifat merakyat dan tidak diskriminatif dalam hal pemenuhan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Orientasi pendidikan juga mengarah pada proses mendidik manusia untuk memiliki jiwa revolusioner dalam kerangka berpikir yang progresif, kritis, dan semangat kebersamaan dalam tatanan hidup bermasyarakat atau terwujudnya masyarakat sosialis.